

Korupsi dan Hedonisme



Yulinda Eristyari, SIKom, MMedKom
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

banyaknya. Praktik korupsi yang sedang ramai diperbincangkan beberapa pekan terakhir muncul ke media berhubungan dengan gaya hidup hedonis para pejabat tanah air, yang mana menunjukkan signifikan antara gaya hidup hedonis dengan intensi praktik korupsi, semakin tinggi gaya hidup hedonis seseorang maka semakin tinggi pula intensi korupsi yang dilakukan.

Penangkapan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menteapkan Rafael sebagai tersangka setelah mengantongi beberapa bukti. Diduga, Rafael aktif merekomendasikan perusahaannya

untuk menawarkan jasa konsultasi pajak kepada para wajib pajak yang tersandung persoalan perpajakan.

Praktik korupsi di Indonesia nampaknya sudah menjadi hal yang lumrah dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti pada kasus Rafael Alun sebagai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jabatan tinggi di Direktorat Jenderal Pajak yang tidak sungkan untuk melakukan gratifikasi. Pada hal ini, perilaku atau praktik korupsi merupakan salah satu bentuk konkret dari perilaku memperkaya diri sendiri tanpa batas, tanpa adanya pertanggungjawaban serta penguasaan diri. Dikarenakan dalam diri manusia memiliki hasrat untuk berkuasa dan mencari kesenangan. Oleh karena itu, jadi perhatian bagi pemerintah dalam mengupayakan pengentasan praktik korupsi secara lebih tegas lagi. Agar tidak selalu dilihat sebagai tindakan yang wajar yang dilakukan oleh para pejabat tanah air.

Timbulnya perilaku korupsi dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, Pertama adalah apakah lembaga pemerintah memberikan peluang pada tindakan korupsi. Kedua, konteks budaya yang mempengaruhi psikologi orang-orang yaitu mencari kenikmatan (Rifa'i, 2018 : 1-13). Ketiga, pengaturan tekanan ekonomi yang memungkinkan memberikan tekanan-tekanan tertentu. Korupsi pada kenyataannya tidak hanya disebabkan oleh sistem pemerintahan yang buruk, namun korupsi turut dipengaruhi oleh hasrat manusia.

Hubungan perilaku hedonis dan praktik korupsi adalah isu yang mencuat tidak hanya beberapa tahun terakhir, ajaran hedonisme sendiri hadir pada 433 Sebelum Masehi untuk memberikan argumentasi filsafat tentang sesuatu yang terbaik atau tujuan dalam hidup manusia. Hal ini dimulai oleh Sokrates yang mengajukan pertanyaan mengenai tujuan akhir yang dicapai dalam hidup manusia. Pandangan tentang kesenangan ini diteruskan oleh seorang filsuf Yunani yaitu Epikuros yang berpendapat bahwa perbuatan seseorang yang selalu mencari kebahagiaan adalah sifat alamiah dari manusia.

Hedonisme merupakan ajaran yang mengedepankan sesuatu dapat dikatakan baik jika dapat memuaskan keinginan manusia dan mendatangkan kesenangan. Manusia akan menjadi senang dengan mencari kenikmatan sebahagia mungkin karena kebahagiaan merupakan tindakan dari tujuan hidup. Paradigma hedonisme mengarahkan tujuannya kepada kebahagiaan dan berusaha menghindari berbagai penderitaan (Tjahjadi, 2009).

Sikap hidup hedonis yang telah merusak hidup manusia harus dikelola dengan baik, dengan pengenalan akan tindakannya, kemudian mengarahkan tindakan-tindakan tersebut kepada kebenaran. Cara mengelolanya adalah dengan mengedepankan dorongan-dorongan nafsu manusia menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa diterima oleh masyarakat. Misalnya keinginan untuk berkuasa (korupsi) bisa diangkat menjadi keinginan untuk mencapai hal-hal yang berguna bagi masyarakat luas. Hasrat untuk mencapai kenikmatan diangkat dari dorongan untuk menunda keinginan-keinginan rendah jangka pendek menjadi kenikmatan yang sifatnya jangka panjang, dan memberikan kebaikan pada orang lain.

Perilaku korupsi tentunya harus dilihat sebagai masalah moral etis. Seseorang melakukan korupsi dikarenakan adanya sebuah niat dan dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan tindakan korupsi. Karena itu, masalah moral manusia mesti ditangani agar tidak tergooda untuk melakukan tindakan korupsi. Pendekatan etis-moral ini merupakan langkah pencegahan terhadap masalah korupsi. Manusia sebagai pelaku korupsi mesti disadarkan secara moral agar tidak memiliki keinginan dan dorongan serta mampu mengontrol nafsu diri untuk melakukan tindakan korupsi.



UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

Panitikisma,

jalan penghubung antara lokasi penambangan pasir dengan jalan aspal tanpa berkomunikasi dengan kalurahan," ujar Supri.

Permasalahan administrasi pertanahan juga dikemukakan Sigit, dukuh di Kalurahan Sidomulyo. Menurutnya, dahulu terjadi praktik tukar guling Tanah Kas Kalurahan dengan tanah warga untuk pembangunan gedung SD. "Sampai sekarang sertipikat tanah pengganti untuk warga tersebut belum terbit," ungkap Sigit.

Jeni Widiyatmoko, Anggota Komisi IV DPRD Kulonprogo menyampaikan keluhan warga terkait penambangan. Selain kerusakan infrastruktur jalan,

dampak lainnya yang langsung dirasakan berupa berkurangnya debit air di sungai-sungai untuk keperluan pengairan lahan pertanian. "Masukan saya agar Pemerintah memperbanyak daerah irigasi, serta merealisasikan pembangunan embung. Sudah ada feasibility study dari Dinas PUP ESDM DIY, tinggal direalisasikan," kata Jeni.

Menjawab beberapa pertanyaan itu, Suryo Satriyanto menyampaikan, revisi Pergub DIY 34/2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa saat ini masih berjalan. "Kami menyadari dengan proses revisi Pergub DIY 34/2017, izin pemanfaatan lahan Tanah Kas Kalu-

rahan barangkali ada hambatan. Namun bila permohonan izin dari kalurahan belum terealisasi, dari Panitikisma Kraton Yogyakarta bisa melakukan pendampingan," ujarnya.

Mengenai tukar guling tanah, Pemkal agar menaati Pasal 55 Pergub DIY 34/2017. Sampai saat ini, sudah banyak dokumen permohonan izin tukar guling Tanah Kalurahan yang diperoleh dari hak anggadu Kasultanan dengan tanah warga yang sudah masuk ke Panitikisma. Panitikisma juga berkoordinasi dengan Dinas PTR Kabupaten dan Kantor Pertanahan Kabupaten, agar pengurusan tukar guling tanah ini berangkat dari semangat un-

duk penyelesaian masalah, sehingga kalurahan dapat dibimbing untuk memenuhi kelengkapan administrasi permohonannya.

KRT Suryo menambahkan, dengan makin banyaknya pelanggaran pemanfaatan Tanah Sultan Ground (SG), Panitikisma mendorong Pemda DIY agar segera melakukan penindakan. Kebijakan Kraton Yogyakarta belum memberikan izin penambangan bagi siapa pun di atas SG. Ngrasa Dalem justru concern dengan pertanian, yang tercermin pada revisi Pergub DIY 34/2017 berupa pengaturan porsi Tanah Kas Kalurahan untuk lahan pertanian.

Noviar Rahmad menjelaskan, pengawasan aktivitas penambangan ada di Satpol PP DIY, termasuk pengawasan pemanfaatan Tanah Kalurahan secara umum. "Apabila ada aktivitas penambangan yang tidak berizin atau melanggar izin, tolong hubungi Satgas Pengawasan Tambang di 081325398451. Akan kami tin-

dak sesuai prosedur," tegas Noviar.

Sedangkan Tri Saktiyana meminta lurah mencermati izin tambang yang dipegang investor di wilayahnya. Izin tambang ada dua jenis, izin eksplorasi yang sifatnya masih penelitian lokasi, dan izin eksploitasi untuk yang sudah melakukan pengambilan/penambangan pasir. "Tolong lapor juga ke Pemkab Kulonprogo kalau ternyata jenis izinnya baru eksplorasi, tapi perusahaan sudah melakukan pengambilan pasir," ujarnya.

Kusno Wibowo menyampaikan, dampak penambangan pada kondisi jalan yang rusak, Dinas PUP ESDM DIY sedang mengupayakan ada CSR dari perusahaan tambang untuk perbaikan jalan jalur tambang tersebut. Terkait FS pembuatan embung, tahun 2022-2023 fokus anggaran reguler untuk pemeliharaan embung yang ada, dan terbuka kemungkinan pengusulan melalui Danais. Diinformasikan, di Dinas PUP ESDM terdapat Tim

Penanganan Kemiskinan Ekstrem Terintegrasi yang menasar rumah-rumah tidak layak huni, termasuk jambanisasi dan penyediaan saluran air bersih. "Sudah dianggarkan

melalui Danais untuk tahun 2023 di wilayah Gunungkidul dan Bantul. Semoga tahun-tahun berikutnya menjangkau Kulonprogo," pungkas Kusno. (Awh)-d



Prakiraan Cuaca		Kamis, 13 April 2023	
Lokasi	Cuaca	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☀️	23-31	70-95
Sleman	☀️	23-30	75-95
Wates	☀️	23-31	70-95
Wonosari	☀️	23-30	70-95
Yogyakarta	☀️	23-31	70-95

Kinerja

Realitas ini menjadi cambuk untuk memacu kinerja dan tidak ada alasan untuk terus berpredikat merugi karena pastinya kerugian itu akan memberatkan anggaran negara. Selain itu, hal mendasar yang juga harus dibenahi adalah pembersihan stigma bahwa BUMN menjadi sapi perah bagi parpol penguasa. Betapa tidak? Stigma ini pastinya menjadi ironi terutama dikaitkan dengan komitmen daya saing dan persaingan di era global yang menuntut ada keunggulan kompetitif di semua lini usahanya.

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa di era now ada 3 tantangan yang harus siap dihadapi siapapun, termasuk BUMN. Pertama: globalisasi yang cenderung terus terbuka, memaksa semua pelaku usaha untuk menatap masa depan dengan kepastian daya saing yang dimilikinya tanpa terkecuali. Artinya, globalisasi menjadikan peluang sekaligus tantangan yang tidak mudah. Karena hanya yang mampu bersaing yang bisa tetap hidup dan survive.

Jadi, pelaku usaha yang proaktif dan adaptif terhadap semua tuntutan perubahan yang akan bisa bersaing dan bertahan. Sementara yang bersikap reaktif pasti akan kalah bersaing dan akhirnya kolaps. Fakta ini sekaligus menjadi gambaran bahwa kesiapan bertarung di pasar global menuntut adanya kesiapan sarpras yang mumpuni. Ini pastinya membutuhkan alokasi pendanaan yang tidak kecil.

Kedua, disrupsi era digitalisasi semakin menuntut adopsi teknologi di semua aspek tanpa terkecuali. Oleh karena itu tidak ada pilihan kecuali menerima kenyataan adopsi di semua bidang. Baik dalam bentuk transformasi digital dan atau keperluan yang secara tidak langsung menuntut perubahan dan adaptif terhadap semuanya.

Ketiga, faktor yang juga tidak penting untuk diperhatikan adalah aspek kesehatan. Fakta pan-

demi 2 tahun kemarin menjadi pembelajaran bahwa kesehatan adalah mutlak karena menyangkut kemampuan jasmani - rohani. Betapa tidak?

Dana alokasi untuk kepentingan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai ratusan triliun rupiah. Data realisasi per 28 Oktober 2022 mencapai Rp 256,28 triliun atau 56,2% dari total Rp 455,62 triliun. Sebaran dana PEN adalah untuk penanganan Kesehatan Rp 43,4 triliun (35,2% dari pagu Rp 122,54 triliun), perlindungan masyarakat Rp 113,9 triliun (terserap 73,6% dari pagu Rp 154,76 triliun). Ini termasuk didalamnya untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 21,4 triliun, kartu sembako Rp 32,9 triliun, BLT minyak goreng Rp 7 triliun, BLT desa Rp 22,7 triliun, subsidi upah Rp 6,68 triliun, BLT BBM Rp 6,5 triliun, dukungan APBN untuk perlindungan masyarakat Rp 1,6 triliun dan Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung Nelayan (BT-PKL WN) Rp 1,3 triliun.

Alokasi PEN ketiga adalah untuk penguatan pemulihan ekonomi, yang telah terealisasi Rp 99,2 triliun, termasuk juga untuk sektor padat karya Rp 15,4 triliun, infrastruktur dan konektivitas Rp 12,3 triliun, pariwisata dan ekonomi kreatif Rp 6,1 triliun. Untuk ketahanan pangan Rp 16,2 triliun, TIK Rp 7,8 triliun, kawasan industri Rp 0,9 triliun, dan insentif perpajakan Rp 14, 1 triliun.

Fakta di atas memberikan gambaran betapa kiprah BUMN di masa depan sangat tergantung kepada kesiapan internal dan juga faktor eksternal sebagai bagian dari globalisasi yang tidak bisa terlepas dari kepentingan daya saing. Menjadi sangat penting bagi BUMN untuk bisa memberikan kontribusi maksimal di era kekinian. Sehingga BUMN terlepas dari stigma merugi dan menjadi sapi perah untuk kepentingan parpol, apalagi pada tahun 2024 akan ada hajatan demokrasi yaitu pilpres. (Penulis adalah Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta)-d

Tim Seleksi BAWASLU DIY Membuka Pendaftaran

YOGYA (KR) Tim Seleksi Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta membuka pendaftaran untuk menjadi calon anggota BAWASLU DIY bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Ketua Tim Seleksi Calon Anggota BAWASLU DIY, Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. mengatakan sebanyak dua orang anggota Bawaslu DIY akan habis masa jabatannya pada tahun ini.

"Karena itu kami menjalankan tugas dari negara untuk menyeleksi, mengisi kekosongan dua orang tersebut yang akan duduk sebagai anggota Bawaslu DIY untuk periode 2023-2028," katanya.

Pihaknya pun berharap nantinya warga negara Indonesia yang memiliki komitmen, integritas dan pengalaman terkait kepemiluan bisa mendaftarkan dirinya. Pendaftaran baru akan dimulai pada 17 April mendatang dan berlangsung sampai dengan 3 Mei 2023.

"Dokumen pendaftaran dibuat rangkap tiga disampaikan langsung atau melalui POS Kilat Khusus ke Sekretariat Tim Seleksi di Unit A1.11 Green Park Apartment, Jalan Baladewa, Glendongan, RT 15, Tambakbayan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55218," lanjutnya.

Selain itu berkas juga bisa dikirimkan melalui email ke timselprov2023@yogyakarta.bawaslu.go.id. Sementara mengenai syarat pendaftaran secara detil menurutnya bisa dilihat

melalui laman timselprov.yogyakarta.bawaslu.go.id.

"Pendaftar harus dipastikan putra-putri terbaik DIY yang mempunyai kesetiaan kepada Pancasila, UUD, dan NKRI, serta berdomicili di DIY dengan dibuktikan melalui KTP. Ini normatif tapi penting, karena mereka akan mengawal kualitas demokrasi dan memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan LUBER dan JURDIL. Syarat lain yaitu berusia minimal 35 tahun," imbuhnya.

Tentang usia ini menurutnya penting karena terkait dengan kematangan dimana diharapkan anggota Bawaslu yang terpilih memiliki kematangan secara intelektual, emosional dan juga kesehatan fisik, dan rohani. Selain itu ia juga mendorong mereka yang telah berpengalaman di Lembaga penyelenggara Pemilu diharapkan semua untuk mendaftar. Agar terbentuk Bawaslu DIY yang inklusif, Inayah juga mendorong perempuan, kelompok diffable, dan kelompok rentan lainnya untuk terlibat mendaftar pada proses seleksi kali ini.

"Nanti, tahapan seleksinya ada administrasi kemudian verifikasi berkas pendaftaran dan jika belum lengkap bisa dilengkapi dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian setelah itu kami umumkan yang lolos seleksi administrasi ini untuk bisa mengikuti tahapan selanjutnya berupa tes tertulis, tes psikologi, tes kesehatan, dan terakhir wawancara," pungkasnya. (*)

MIMBAR LEGISLATIF DPRD KABUPATEN BANTUL

DAMBA AKTIVIS, WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BANTUL

Soroti Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

BANTUL (KR) - Sejumlah program digulirkan pemerintah Kabupaten Bantul. Masyarakatpun sudah mulai merasakan dampak positif dari kegiatan yang dijalankan tersebut. Meski begitu, evaluasi tetap harus dilakukan agar kedepannya hasil yang dicapai semakin baik dan bermanfaat bagi rakyat Bantul secara keseluruhan.

Salah satu fokus perhatian dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Damba Aktivistis ialah, terkait pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Dalam dua tahun terakhir ini sudah mulai ada perencanaan matang, transparan dan sudah mulai baik. Artinya semua program aspirasi dari anggota tertuang didalam SIPD. Tentunya mekanismenya melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan serta melalui reses termasuk tahapan Musrenbangdes.

"Kita tahu bahwa reses ini melalui tahap mengumpulkan seluruh warga masyarakat, perwakilan RT dan warga lain. Tentu banyak hal disampaikan dan evaluasi bagi kami. Pengajuan-pengajuan program-program di Kabupaten Bantul terutama di dapil VI itu, 70% berupa pembangunan fisik. Sisanya 30% adalah pemberdayaan, mulai kelompok masyarakat, ibu-ibu, kelompok tani sampai kelompok ternak dan sebagainya," ujar Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Aspirasi tersebut tentunya bisa diakomoti bahkan sudah ada di dalam kamus SIPD. Tetapi ini juga bagian yang menjadi evaluasi dari legislatif dan eksekutif. "Berkaitan pendidikan,

inginkan adanya kenai kan terhadap ekonomi salah satunya ketika di kamus SIPD dicantumkan beasiswa bagi pendidikan anak. Ini mungkin bisa membantu lebih banyak," jelasnya.

Terkait program di dapil VI khususnya Kapanewon Kasihan dan Sedayu. Sekitar 60 % pembangunan secara fisik sudah bisa terpenuhi. Kemudian sisa 40% bisa bertahap, karena jika melihat di Kasihan, secara infrastruktur perbatasan dengan kota Yogyakarta. "Yang seperti itu memang perlu kita support terutama di wilayah tertentu seperti di Bangunjiwo. Sedang yang perlu kita pegang soal anggaran. Misalnya kita per tahun itu diangkat sekian miliar itu memang perlu pemerataan bertahap dan berjenjang itu yang tentu dipahami masyarakat," ujarnya.

Karena pada saat mereka menyampaikan usulan aspirasi. Lantas langsung direspon. "Bila soal fisik insya Allah itu selesai tetapi yang menjadi persoalan kami yang ada di dapil ini sebenarnya soal pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

Damba juga menyroti, soal program PBBMP yang setiap dusun mendapat Rp 50 juta. Program itu sebenarnya sudah mulai dirasakan oleh warga masyarakat. Karena yang belum tercover anggota dewan, bisa teratasi dengan suntikan program Rp 50 juta itu. "Tetapi ini juga menimbulkan persoalan sebenarnya kalau kita mengkritisi. Apakah PBBMP Rp 50 juta per pedukuhan ini masuk dalam SIPD." ujarnya. (Roy)



DAMBA AKTIVIS
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul